

**IMPLEMENTASI PRINSIP *ECOLOGICAL CIVILIZATION* DALAM PROGRAM *BELT AND ROAD INITIATIVE* DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:  
REGINA FARAH NAFILAH  
E061201004

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP *ECOLOGICAL CIVILIZATION*  
DALAM PROGRAM *BELT AND ROAD INITIATIVE* DI  
INDONESIA

N A M A : REGINA FARAH NAFILAH

N I M : E061201004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

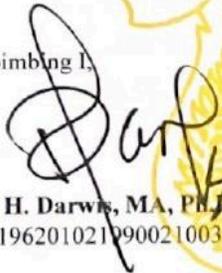
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Juni 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

  
Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

  
Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :  
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

  
Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP *ECOLOGICAL CIVILIZATION*  
DALAM PROGRAM *BELT AND ROAD INITIATIVE* DI  
INDONESIA

N A M A : REGINA FARAH NAFILAH

N I M : E061201004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 31 Mei 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the list of names. The top signature is for Prof. H. Darwis, the middle one for Abdul Razaq Z Cangara, and the bottom one for Drs. Munjin Syafik Asy'ari. Each signature is written over a horizontal dotted line.

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Farah Nafilah  
NIM : E061201004  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 10 Juni 2024



**Regina Farah Nafilah**

---

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Farah Nafilah  
NIM : E061201004  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

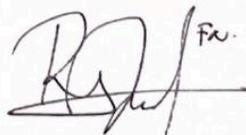
**Implementasi Prinsip *Ecological Civilization* dalam Program *Belt and Road Initiative* di Indonesia**

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar  
Pada tanggal : 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



**Regina Farah Nafilah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang telah dilalui. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan dalam perjalanan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi segala proses sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Prinsip *Ecological Civilization* dalam program *Belt and Road Initiative*”. Tanpa petunjuk-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** beserta jajarannya.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,** serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Kepada **Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Prof. H. Darwis MA, P.hD** yang telah memberikan banyak pembelajaran, masukan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas seluruh motivasinya yang diberikan, Prof.
4. Bapak **Prof. H. Darwis MA, Ph.D,** selaku Dosen Pembimbing I, dan Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP, M.Si, M.IR,** selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh semangat membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan pembimbing yang sangat suportif dan mengayomi.
5. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, Bapak Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Bapak Drs. H. Husein Abdullah, M. Si., Bapak M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Bapak Ishaq**

**Rahman, S. IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP, Ibu Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Ibu Pusparida, Syahdan, S. Sos., M.Si., Ibu Nur Isdah, S. IP., MA, Bapak Burhanuddin, S. IP., M. Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Bapak Dr. Adi Suraydi B. MA., Kak Ashry Sallatu, S.IP, M.Si, Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Kak Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Kak Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., M. IR., Kak Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA, Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, dan Kak Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.** Terima kasih atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Juga, kepada seluruh Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Rahmah, Pak Ridho, Pak Dayat, dan Kak Salni yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan.

6. Kepada Ayah dan Ibu penulis, **Syarifuddin Sara dan Suhartini** yang telah memberikan penulis kasih sayang, dukungan, cinta, doa, dan segalanya yang terbaik tanpa batas untuk penulis. Tidak henti-hentinya penulis berterima kasih kepada Allah telah mengizinkan penulis untuk menjadi anak yang beruntung mendapatkan orang tua yang luar biasa. Penulis berharap segala kebaikan dan cinta Ayah dan Ibu bisa penulis balas meskipun tidak ada habisnya.
7. Kepada **Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA** yang merupakan pembimbing penulis selama rangkaian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional 2023. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta hal baru yang diajarkan kepada penulis.
8. Sahabat penulis di kuliah, **Ananda Ashani Fitriani Darwis, Muh. Ayyub Maksam, Karisma Nurul Izzah, dan Siti Nurhaliza** yang telah menjadi teman berjuang, berkeluh kesah, motivator, suporter, dan segalanya bagi penulis selama berkuliah, terutama saat penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada Allah SWT telah mempertemukan dan memberkahi penulis dengan keberadaan mereka.
9. *My bestest friends and 119* selama di Jakarta, **Muh. Faris Nirwan dan Ananda Ashani**. *Wouldn't survive Jakarta without you both! Let's rock the world together.*
10. Geng Kobester yang terdiri dari **Siti Fadhilla Maulidya, Muh. Fadli Al-Kautsar, dan Muh. Faris Nirwan**. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi dan saling mendukung satu sama lain

11. Grup yang namanya cukup membingungkan, Siap Cuci Beras, terdiri dari **Hawainah, Chika, Anis, Nita, Ainul, Cici, Qilah, dan Safira** yang telah menjadi teman baik penulis sejak SMA.
12. Teman-teman SMA penulis dengan grup angkatan bernama **IGNITE, Aflah, Ninna, Jinan, Iffa, Fian, Arya, Syawal, Ami, dan seluruhnya** yang telah menjadi tempat belajar penulis atas banyak hal.
13. Teman kamar penulis semasa SMA, **Aul, Nina, dan Balqies**. *What would I be without you guys?*
14. Board of Dais Unhas MUN Community 2021/2022, **Ananda Ashani Fitriani, Darwis, Cikal Amanda Putri, Gurpreet Kaur, Muh. Fajhriyadi Hastira, Karisma Nurul Izzah, dan Sophia Marsella** yang telah menjadi tim yang baik dan krusial bagi penulis untuk tumbuh kembang di organisasi pertama di perkuliahan. Penulis banyak belajar dan berterima kasih atas lingkungan yang suportif.
15. Teman-teman Board of Executive FPCI Chapter Unhas 2023/2024, **Faje, Cacaz, dan Nanda**. Terima kasih telah membangun kembali FPCI Chapter Unhas dan menjadi sumber inspirasi penulis dalam banyak hal.
16. Kakak dan teman grup Ulara, **Kak Daffa, Kak Dinda Salsabila, Kak Annisa Fauziah, Kak Amelia Nurkasih, Kak Chantika Salsabila, Sonia, Ica, Lilis, dan Ayyub** yang telah menjadi tempat penulis untuk berdiskusi, bertanya, dan berkonsultasi dalam banyak hal baik akademik maupun non akademik yang berkontribusi besar dalam perjalanan penulis selama berkuliah.
17. Teman-teman magang penulis di Komisi I DPR RI, **Naraya, Nadine, Tri, Icad, Jihan, Devita, Caca, Syarah, dan Yaya** yang telah menjadi teman baik sekaligus mengajarkan penulis banyak hal baru selama magang.
18. Teman-teman awardee IISMA di University of Tartu, **Ferinthania, Alwan, Fahrian, David, dan Dani** yang telah menjadi keluarga baru penulis selama 6 bulan pertukaran pelajar di Estonia. Penulis bersyukur dipertemukan dengan keluarga baru yang baik dan selalu mendukung penulis, terima kasih atas kebahagiaan, kenangan, pembelajaran, dan tawa yang sangat berarti bagi penulis.
19. Teman-teman KKN Desa Bontobunga, **Putri, Nadia, Andi Mudria, Salsa, Rafiqah, Lisa, Ica, Furqan, Naqilah, dan Mida** yang telah menjadi teman posko yang baik dan hidup bersama selama 45 hari. Penulis berterima kasih telah diberikan dukungan dalam banyak hal, termasuk proses penulisan skripsi ini.

20. Teman-teman Banner Capres, **Ratu, Natasya, Nirzam, Ica, dan Lilis** yang telah memberikan penulis banyak dukungan dalam proses penyelesaian skripsi dan diabadikan bersama dalam banner capres 17 Februari 2024. Semoga kelak kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi Indonesia tercinta.
21. Teman-teman **STUVO HI #TerlahirKeren** yang telah memberikan penulis banyak pelajaran dan bantuan dalam berproses selama perkuliahan.
22. Teman-teman **IYD Local Chapter South Sulawesi, Mahasiswa Berprestasi Universitas Hasanuddin 2023, YAR-TSRA UNESCO x Tanoto Research Team** yang telah menemani dan mengisi memori penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
23. Seluruh teman-teman angkatan HI 2020 (Altera), **Iqbal, Amirah, Raihan, Nesa, Imjak, Mashita, Alya, Echa, dan seluruhnya** yang telah menemani penulis dan memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis baik selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
24. Kakak-Kakak Senior, **Kak Daffa Rizqillah, Kak Adis Dwi Maghfira, Kak Indra, Kak Vanessa Aulia, Kak Nadin, Kak Annisa Apriliani, Kak Nurul Habaib, Kak Rifli Mubarak, Kak Achmad Rinaldy, Kak Lau, Kak Tiara Taufiq, Kak Amelia Nurkasih, Kak Chantika Salsabila, Kak Dinda Salsabila** yang telah membimbing, mendukung, dan memberikan penulis begitu banyak pembelajaran, bantuan, nasehat, dan hal-hal lain yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Penulis tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah SWT telah memberikan penulis senior yang selalu suportif dan mendorong penulis disetiap langkah agar konstruktif.

## ABSTRAK

**REGINA FARAH NAFILAH, (E061201004), “Implementasi Prinsip *Ecological Civilization* dalam Program *Belt and Road Initiative* di Indonesia”** dibawah bimbingan **Prof. H. Darwis MA, P.hD** sebagai pembimbing pertama dan **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** sebagai pembimbing kedua pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Skripsi ini dimotivasi oleh program *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan konektivitas dengan negara-negara sekitarnya. Bagi Indonesia, BRI menawarkan peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan memperkuat posisi negara di pasar global. Meskipun telah mencapai banyak kesuksesan, program ini juga menghadapi kritik, terutama terkait dampak lingkungan. Pemerintah Tiongkok memperkenalkan prinsip *Ecological Civilization* (EC) untuk menanggapi kritik-kritik ini, tetapi masih terdapat paradoks dalam implementasi prinsip ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip EC diterapkan dalam program BRI di Indonesia, khususnya dalam pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat dan menggunakan teknik tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai jurnal, artikel, buku, situs web, dan studi yang berkorelasi dengan skripsi ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proyek IMIP dan KCIC telah mengadopsi prinsip EC yang menekankan pentingnya keberlanjutan, implementasinya masih belum sempurna. Kedua proyek menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, tetapi ditemukan berbagai kekurangan di lapangan, seperti fokus berlebihan pada investasi di IMIP serta inkonsistensi antara operasi dan AMDAL KCIC. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Target yang tinggi untuk kedua proyek tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap lingkungan, sehingga berdampak pada kehidupan banyak orang. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa langkah positif, penerapan prinsip EC dalam proyek-proyek BRI di Indonesia memerlukan peningkatan yang signifikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

**Kata kunci:** *Ecological Civilization, Belt and Road Initiative, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)*

## ABSTRACT

**REGINA FARAH NAFILAH, (E061201004), “The Implementation of Ecological Civilization Principles in the Belt and Road Initiative Program in Indonesia”** under the guidance of **Prof. H. Darwis MA, P.hD** as the first supervisor and **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** as the second supervisor at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This thesis is motivated by the Belt and Road Initiative (BRI) program launched by the Chinese government in 2013, aiming to enhance investment and connectivity with surrounding countries. For Indonesia, BRI offers significant opportunities for infrastructure development and strengthening the country's position in the global market. Despite its many successes, the program has also faced criticism, especially regarding environmental impacts. The Chinese government introduced the principles of Ecological Civilization (EC) to address these criticisms, but there remains a paradox in the implementation of these principles. This study aims to explore how the EC principles are applied within the BRI program in Indonesia, particularly in the construction of Indonesia China High Speed Rail or Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) and PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). The research method applied in writing this thesis uses a descriptive research type where the data is collected through interviews with community representatives and using literature review techniques to collect data from various journals, articles, books, websites, and studies that correlate with this thesis. This research finds that although IMIP and KCIC projects have adopted the EC principles emphasizing the importance of sustainability, the implementation is not yet perfect. Both projects demonstrate awareness of the importance of sustainability through implementing the principles of EC, but various shortcomings in the field, such as an excessive focus on investment in IMIP and inconsistencies between the actual operation of KCIC and its environmental impact assessments. This shows that further efforts are needed to improve the situation. The high targets for both projects resulted in insufficient attention to the environment, thus impacting the lives of many. Overall, despite some positive steps, the application of EC principles in BRI projects in Indonesia requires significant enhancement to achieve the desired goals.

**Keywords:** Ecological Civilization, Belt and Road Initiative, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
a. Konsep <i>Ecological Civilization</i> .....	16
b. Bantuan Luar Negeri.....	20
c. Penanaman Modal Asing/ <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> .....	29
d. Operasional Variabel.....	33
e. Model Analisis.....	35
E. Metode Penelitian.....	35
a. Tipe Penelitian.....	35
b. Jenis Data.....	36
c. Teknik Pengumpulan Data.....	36
d. Teknik Analisis Data.....	37
F. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>
A. Konsep <i>Ecological Civilization</i> .....	39
B. Bantuan Luar Negeri.....	43
C. <i>Foreign Direct Investment</i> .....	46
E. Penelitian Terdahulu.....	50
<b>BAB III KONSEP <i>ECOLOGICAL CIVILIZATION</i> DAN PROGRAM <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i> .....</b>	<b>58</b>
A. Dinamika Program BRI dalam Ranah Global.....	58

B. PT Indonesia Morowali Industrial Park dan PT Kereta Cepat Indonesia China..	84
C. Prinsip <i>Ecological Civilization</i> dalam Program <i>Belt and Road Initiative</i> .....	89
<b>BAB IV IMPLEMENTASI KONSEP <i>ECOLOGICAL CIVILIZATION</i> DALAM PROGRAM <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i> DI INDONESIA.....</b>	<b>94</b>
A. Implementasi Prinsip <i>Ecological Civilization</i> dalam Program BRI di Indonesia	94
a. Implementasi Prinsip <i>Ecological Civilization</i> dalam PT Indonesia Morowali Industrial Park.....	98
b. Implementasi Prinsip <i>Ecological Civilization</i> dalam Kereta Cepat Indonesia China.....	108
B. Kritik Berdasarkan Konsep <i>Ecological Civilization</i> dalam Program BRI di Indonesia.....	112
a. Kritik terhadap PT Indonesia Morowali Industrial Park.....	112
b. Kritik terhadap Kereta Cepat Indonesia China.....	120
c. Perbedaan dan Persamaan Implementasi Prinsip <i>Ecological Civilization</i> antara PT Indonesia Morowali Industrial Park dan Proyek Kereta Cepat Indonesia China.....	125
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>161</b>
Lampiran 1. Transkrip Rekaman Wawancara dengan Walhi Sulteng.....	161
Lampiran 2. Transkrip Rekaman Wawancara dengan Walhi Jabar.....	168
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	177
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	178

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prinsip dan Indikator <i>Ecological Civilization</i> .....	18
Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian.....	33
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 4. <i>Database</i> Kebijakan <i>Belt and Road Initiative</i> .....	67
Tabel 5. Proyek BRI di Indonesia.....	77
Tabel 6. Perkembangan Pemikiran Konsep <i>Ecological Civilization</i> .....	89
Tabel 7. Pengelompokan Tujuan Konsep <i>Ecological Civilization</i> .....	97
Tabel 8. Total Produksi Tahunan IMIP.....	100
Tabel 9. Setoran Pajak dan Royalti IMIP ke Negara.....	101
Tabel 10. Indikator yang Berhasil Terpenuhi dan Kurang Terpenuhi dalam Implementasi Prinsip EC dalam Program BRI di Indonesia.....	129

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia.....	81
Grafik 2. Peningkatan Utang dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.....	88
Grafik 3. Jumlah Peringatan Deforestasi di Morowali.....	115
Grafik 4. Bencana Banjir di Sulawesi Tengah.....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta <i>Belt and Road Initiative</i> .....	60
Gambar 2. Negara yang Terlibat Proyek <i>Belt and Road Initiative</i> .....	62
Gambar 3. Infrastruktur dalam <i>Belt and Road Initiative</i> .....	65
Gambar 4. Sektor Keterlibatan <i>Belt and Road Initiative</i> .....	66
Gambar 5. Pemegang Saham PT IMIP.....	84
Gambar 6. Sektor Usaha PT IMIP.....	85
Gambar 7. Perbandingan Pencemaran Moda Transportasi.....	110
Gambar 8. Anomali dan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan (116 Stasiun Pengamatan).... 117	
Gambar 9. Ancaman Dampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Melanggar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.....	121

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

#### **A. Latar Belakang**

Program *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013, yang difokuskan pada kerjasama pembangunan, peningkatan investasi, dan penguatan konektivitas dengan negara-negara di sekitarnya (Chang, 2019). Program BRI disebut oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan, dimana Presiden Xi mengatakan “*Silk Road Economic Belt*” untuk membangun dan mempererat kerja sama ekonomi antar negara Eurasia (Consulate General of The People's Republic of China in Toronto, 2013). Satu bulan setelahnya, Presiden Xi kembali menyampaikan pesan serupa saat berbicara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (Clarke, 2017).

Program BRI menjadi legasi Presiden Xi Jinping dalam kebijakan luar negeri. Momentum peluncuran program BRI bertepatan saat kebijakan luar negeri Tiongkok semakin agresif sehingga program ini seringkali diinterpretasikan sebagai rencana geopolitik daripada ekonomi (Cai, 2017). Program ini meliputi

pembangunan infrastruktur transportasi, koridor industrial, saluran listrik, kereta api, pelabuhan, dan jalur perdagangan sehingga memperluas terjadinya arus ekonomi dan gagasan yang membentang dari Tiongkok hingga Timur Tengah dan Eropa (Meidan & Patey, 2016). Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, program BRI menjadi kebijakan luar negeri ambisius Tiongkok untuk mewujudkan “*The China Dream*”. “*The China Dream*” sendiri dianggap sebagai kebangkitan besar Tiongkok dalam lingkup domestik serta hubungan internasional (Sinaga, 2020).

Menurut data resmi, Pemerintah Tiongkok tengah mengimplementasikan proyek dalam kerangka program BRI di berbagai negara, dengan fokus utama terletak di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika, dan Timur Tengah (Anwar, 2019). Per tahun 2022, program BRI berekspansi hingga ke 149 negara (Herrero & Schindowski, 2023). Beberapa negara Eropa Timur dan Selatan juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) program BRI dengan Tiongkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Tiongkok dengan dunia. Selain itu, dari sisi ekonomi domestik, program BRI juga dapat membantu ekspansi industri dalam negeri Tiongkok ke pasar global serta membantu pembangunan di provinsi bagian Barat Tiongkok berkat konektivitas yang dibangun (Meidan & Patey, 2016).

Memasuki tahun ke-11, program BRI dapat dikatakan sebagai kesuksesan bagi kebijakan ekonomi luar negeri Tiongkok. Mulai dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin, program ini memiliki lebih dari 3.000 proyek yang terdiri dari kereta api, jalan raya, pembangkit listrik, dan pelabuhan serta berhasil mendirikan lebih dari 30 zona kerja sama ekonomi yang mendukung industrialisasi lokal (Gong, 2023). Saat ini, Tiongkok telah menjadi salah satu negara mitra dagang terbesar di dunia. Bukan hanya bermitra dengan negara-negara berkembang yang ada di Asia maupun Afrika, program BRI juga telah menjaring negara maju yang ada di Eropa. Misalnya, Itali yang merupakan salah satu negara raksasa ekonomi di Uni Eropa telah menandatangani MoU kerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka program BRI pada Maret 2019 (Gruebler, 2019).

Indonesia merupakan salah satu mitra dalam program BRI. Bahkan, Indonesia memiliki posisi yang penting dalam program ambisius Tiongkok tersebut. Indonesia merupakan negara dengan posisi strategis terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Fakta ini seharusnya menyokong Indonesia untuk menjadi salah satu *major player* dalam tatanan internasional, tetapi Indonesia masih belum berada dalam posisi tersebut. Dari kacamata Indonesia, program BRI menawarkan kesempatan untuk membangun infrastruktur, memperluas jaringan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global (Damuri et al., 2019) sehingga hal ini diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Selain itu, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka program BRI akan memainkan peran vital dalam perekonomian dunia. Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara dengan penduduk besar di dunia. Indonesia memiliki 275 juta penduduk dan Tiongkok sendiri memiliki 1,41 miliar penduduk (World Bank, 2022). Total populasi kedua negara mencakup kurang lebih 23% total penduduk dunia sehingga hubungan kedua negara memiliki banyak potensi tidak terbatas hanya pada bisnis dan ekonomi (Damuri et al., 2019).

Mengenai investasi yang diterima dari program BRI, Indonesia menjadi negara yang menerima investasi terbesar dengan jumlah investasi sekitar USD 5,6 miliar (Wang, 2023). Saat ini, perusahaan Tiongkok mendominasi industri nikel di Indonesia dan Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memiliki proyek pembangunan kereta api berkecepatan tinggi melalui program BRI (CHEW, 2023). Selama dekade terakhir, perkembangan investasi Tiongkok di Indonesia terus meningkat dan kini telah menjadi kontributor kedua terbesar dari investasi asing bagi Indonesia. Pada tahun 2022, nilai investasi langsung dari Tiongkok di berbagai sektor di Indonesia mencapai 21,5 miliar dolar AS, menyumbang sekitar 25% dari total investasi asing yang diterima oleh Indonesia (Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, 2023).

Meskipun tampak menuai kesuksesan, program BRI menerima banyak kritik. Kritik dilontarkan dalam banyak aspek mulai dari ekonomi, lingkungan, geopolitik, hingga sosial. Proyek dalam kerangka program BRI menunjukkan

risiko-*risiko* yang umumnya terkait dengan proyek infrastruktur berskala besar. Risiko-*risiko* ini semakin meningkat karena kelemahan lembaga-lembaga dalam negeri dan kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik di sejumlah negara yang terlibat (The World Bank, 2019).

Program BRI kerap kali dituduh sebagai praktik *debt trap diplomacy* (DTD) yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara penerima BRI. Pada Mei 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menuduh Tiongkok menggunakan DTD dengan praktik korupsi dan ketidaktransparan, untuk mempengaruhi infrastruktur penting negara tersebut dan melemahkan fungsi politiknya melalui penciptaan utang yang besar (Himmer & Rod, 2022, p. 251). Politisi dan media Barat telah membangun narasi bahwa Tiongkok merupakan pemberi pinjaman yang agresif, bentuk kolonialisasi modern, dan pemberi hutang yang cerdik, yang berpotensi memerangkap negara-negara rentan dengan membebani mereka hutang yang melebihi kemampuan pembayaran, dalam upaya untuk mengamankan pengaruh ekonomi dan politik dengan cara seperti penyitaan aset (Brautigam, 2020, p. 4). Tuduhan ini banyak diberikan terhadap proyek BRI yang berada di negara Afrika, seperti Sri Lanka dan Kenya.

Implementasi program BRI masih jauh dari sifat transparan atau keterbukaan. Secara ideal, proyek BRI seharusnya dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan kompetitif dimana perusahaan pelaksana program tidak memandang kepemilikan atau kewarganegaraan (The World Bank, 2019). Tidak

dapat ditemukan data lintas negara yang bersifat komprehensif dan komparatif terkait dengan proyek BRI (Ghossein et al., 2018). Walaupun skala proyek BRI sangat besar, hingga saat ini tidak ada daftar proyek yang dapat diandalkan, kurangnya keterbukaan terkait standar pinjaman yang diadopsi oleh Tiongkok, dan informasi yang belum diungkapkan mengenai jumlah investasi yang telah dilakukan oleh Tiongkok (Crabtree, 2019).

Masalah lainnya menyangkut proyek BRI adalah lingkungan. Mega proyek BRI menimbulkan berbagai risiko lingkungan (The World Bank, 2019). Melestarikan lingkungan sekaligus mendorong ekonomi dalam program BRI akan menjadi tantangan tersendiri mengingat wilayah program BRI mencakup area yang rentan terjadi kerusakan (Coenen et al., 2021, p. 5). Pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi yang dilakukan dalam kerangka program BRI berpotensi menginduksi dampak lingkungan yang belum terjadi sebelumnya, yang mungkin melampaui nilai manfaat ekonominya (Li et al., 2017).

Saat ini, bank asal Tiongkok masih mendanai lebih dari 70% proyek pembangkit listrik tenaga batu bara melalui kerangka BRI yang tersebar di berbagai negara (ANI, 2017). Padahal, batu bara dikenal sebagai salah satu sumber masalah dari isu lingkungan yang dihadapi sekarang. Lebih lanjut, banyak pembangkit listrik tenaga batubara yang saat ini dalam tahap konstruksi tidak dilengkapi dengan teknologi penangkapan karbon yang efisien (Chiu, 2022). Hal ini semakin buruk dengan fakta bahwa perusahaan bidang batu bara asal

Tiongkok memindahkan bisnisnya ke negara berkembang karena Tiongkok bertujuan untuk menghilangkan penggunaan batu bara di dalam negeri guna mencapai tujuan dari *Paris Agreement* (Feng, 2019).

Beranjak ke program BRI yang ada di Indonesia, sebagian besar investasi yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan pembangunan infrastruktur dan sektor pertambangan yang berisiko menciptakan kerusakan lingkungan dalam tahap konstruksi serta operasinya (Damuri et al., 2019). Hal ini terjadi pada pertambangan nikel yang dilakukan oleh dua perusahaan asal Tiongkok, yaitu *Zhejiang Huayou Cobalt and CNGR Advanced Materials* di Sulawesi Tengah. Masalah lingkungan yang terjadi termasuk perusakan hutan, pencemaran air, dan dampak negatif pada kehidupan laut, sedangkan penangkapan ikan, yang merupakan pekerjaan utama sebagian besar penduduk Sulawesi, sangat dipengaruhi oleh kenaikan suhu air laut akibat pembuangan sistem pendingin dari pembangkit listrik tenaga batu bara (Business & Human Rights Resource Centre, 2023). Inkonsistensi Tiongkok dalam dimensi keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan program BRI terus mendapatkan kritik.

Menjawab kritik terhadap program BRI, pemerintah Tiongkok memperkenalkan *Ecological Civilization* (*shengtai wenming* 生态文明). Pemerintah Tiongkok membentuk satu set prinsip pembangunan yang dikenal sebagai “Peradaban Ekologis” atau *Ecological Civilization* (EC) pada tahun 2018, dimana prinsip ini kini menjadi kekuatan utama dalam transisi negara Tiongkok

menuju pembangunan berkualitas tinggi di “Era Baru” (Xiang-chao, 2018). EC memandu Tiongkok untuk menyesuaikan dan menjawab tantangan abad ke-21 dengan menawarkan landasan konseptual dan modifikasi pembangunan yang lebih memperhatikan masalah lingkungan. EC menjadi produk “*Made in China*” dengan sentuhan keterikatan global (Hanson, 2019).

Sebelum diadopsi secara tertulis ke dalam konstitusi Tiongkok pada Maret 2018 di Pertemuan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok ke-13, prinsip EC melewati serangkaian proses. Pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-17 di tahun 2007, dinyatakan bahwa perlu terdapat prinsip EC yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pola konsumsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang selama ini terhambat karena penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan destruktif. Kemudian, Tiongkok mengadopsi kebijakan yang disebut “*Five in One*” dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 pada November 2012. Dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 di tahun 2017, dilakukan penegasan bahwa EC menjadi tujuan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Tiongkok.

Perlu digaris bawahi bahwa EC berbeda dengan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda global. TPB berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang seringkali bersaing, dengan mengidentifikasi suatu titik optimum di mana semua

kepentingan tersebut dapat bersatu secara sinergis (Wei et al., 2021). EC menjadi menarik untuk dibahas karena konsep ini merupakan sebuah prinsip yang ditampilkan sebagai respons non-Barat terhadap krisis lingkungan hidup global (Weins et al., 2023). Sebagaimana tercantum dalam pedoman resmi Partai dan Dewan Negara RRT, prinsip EC memperkenalkan dua unsur utama tambahan dalam yang tidak ada dalam TPB, yaitu politik dan budaya. Hal ini menciptakan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan model pembangunan berkelanjutan biasa, melibatkan peran politik pusat, perencanaan dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh, serta strategi yang mempertimbangkan keanekaragaman budaya (Hanson, 2019).

EC terdiri dari enam prinsip yang digariskan oleh Presiden Xi Jinping pada Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2018 (Yang, 2021), yang terdiri dari: (1) hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan alam, (2) lingkungan alam sangat berharga (berharga dalam banyak hal) "perairan yang jernih dan pegunungan yang subur merupakan aset yang tak ternilai harganya", (3) ekologi yang sehat adalah barang publik yang paling penting, (4) seluruh ekologi – gunung, sungai, hutan, lahan pertanian, danau, dan padang rumput – membentuk suatu komunitas kehidupan dan harus dikelola secara komprehensif dengan perspektif jangka panjang, (5) peraturan dan undang-undang yang paling ketat harus diterapkan dalam melindungi lingkungan, (6) upaya bersama harus dilakukan untuk membangun peradaban ekologi global;

Tiongkok harus "terlibat secara mendalam dalam tata kelola lingkungan hidup global" (Weins et al., 2023).

Berdasarkan keenam prinsip tersebut, khususnya pada prinsip nomor enam, dapat dikatakan bahwa Tiongkok menargetkan implementasi EC tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar batas negara yang membuat hal ini menarik untuk dibahas. Implementasi prinsip EC bukan hanya sekedar agenda nasional, tetapi diintegrasikan ke dalam agenda kepemimpinan Tiongkok di tingkat global untuk menyelesaikan isu lingkungan melalui kerangka program BRI. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRI yang dilaksanakan Oktober 2023 dimana ia mengumumkan komitmen Tiongkok untuk meningkatkan investasi di bidang energi terbarukan (Zhou & chen, 2023). Melalui pedoman berdasarkan prinsip EC, proyek-proyek dalam kerangka program BRI menjadi lebih ramah lingkungan sesuai dengan semangat yang tercantum dalam prinsip.

Inisiatif pemerintah Tiongkok untuk menggagas prinsip EC menunjukkan adanya usaha untuk membangun harmonisasi budaya dan alam sesuai dengan semangat BRI untuk menjadi lebih hijau. Pada tahun 2017, Tiongkok mengeluarkan pedoman untuk mempromosikan pendekatan ramah lingkungan dalam BRI, yang melibatkan dorongan kepada perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan global. Tahun sebelumnya, Tiongkok mengumumkan peluncuran inisiatif kemitraan BRI yang berfokus pada pembangunan yang ramah

lingkungan dengan lebih dari 30 negara, termasuk negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji, Maladewa, dan Kepulauan Solomon. Tiongkok juga telah mendirikan beberapa pusat informasi iklim di negara-negara yang menjadi mitra BRI (Lee, 2022).

Prinsip EC menjadi jalan keluar untuk pelaksanaan pembangunan program BRI yang lebih ekologis. Namun, berdasarkan pendapat pakar proyek BRI masih seringkali merusak lingkungan. Meskipun pemerintah Tiongkok menegaskan akan berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, studi menunjukkan bahwa 86% pendanaan Tiongkok untuk proyek energi Indonesia disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui *China Development Bank* (CDB) dan *China Export-Import Bank* (CHEXIM) (Rakhmat & Purnama, 2023). Saat ini, terdapat tiga proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang dibangun dengan pendanaan dari perusahaan China sekaligus sebagai bagian dari program BRI di Indonesia (Rakhmat et al., 2023). Proyek tersebut berlokasi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Berdasarkan penjelasan dan data yang dikemukakan ahli, terdapat paradoks terkait implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program BRI. Paradoks ini tercermin dari ketidaksesuaian realitas di lapangan dimana program BRI masih seringkali merusak lingkungan. Saat ini, sudah terdapat beberapa penelitian mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh program

BRI di Indonesia, seperti pemetaan dan mitigasi dampak lingkungan serta sosial (PRAMONO et al., 2022), tantangan lingkungan dan implikasi kebijakan dalam program BRI (Zhai, 2021), serta pro dan kontra program BRI dalam minat Indonesia terhadap program BRI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Octastefani & Romadhoni, 2023). Namun, penelitian mengenai prinsip EC dan konsistensi Tiongkok dalam mengimplementasikan prinsip tersebut di program BRI di Indonesia belum dapat ditemukan. Penulis melihat signifikansi prinsip EC dan ingin melakukan penelitian mengenai implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program BRI untuk mendapatkan hasil yang lebih valid terhadap dinamika pelaksanaan EC pada konteks kerja sama Tiongkok dan Indonesia dalam kerangka program BRI. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan judul **Implementasi Prinsip *Ecological Civilization* dalam Program *Belt and Road Initiative* di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat prinsip EC merupakan konsep yang kompleks, maka Penulis menetapkan batasan masalah dan berfokus pada implementasi prinsip EC dalam program BRI di Indonesia. Selain itu, jangka waktu penelitian ini mengambil rentang waktu antara 2019 hingga 2023 mengingat prinsip ini secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping dalam forum internasional pada tahun

2018 dan terdapat pernyataan untuk “menghijaukan” program BRI pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengambil 2 *signature program* BRI di Indonesia yang masing-masing mewakili program dalam bentuk bantuan luar negeri berupa utang dan *foreign direct investment*. Program pertama adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) karena program ini merupakan salah satu proyek *flagship* BRI (Berger, 2023) dan merupakan program BRI yang telah beroperasi dengan nilai terbesar, yaitu 5.5 miliar USD (LSE IDEAS & CIMB Asian Research Institute, 2018). KCIC menjadi proyek BRI dalam bentuk bantuan luar negeri berbentuk utang. Program kedua adalah *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP). Saat ini, daerah tersebut telah menjadi wilayah dengan jumlah smelter nikel terbesar di Indonesia, mencapai total 11 unit. IMIP merupakan salah satu proyek berbentuk *foreign direct investment* dengan bentuk *joint-venture*. PT IMIP merupakan pengelola manajemen dan keamanan di lokasi tersebut, sedangkan mayoritas dimiliki oleh Tsingshan Holding Group melalui Shanghai Decent Investment Group, Bintang Delapan Investment, dan PT Sulawesi Mining Investment (Ginting & Moore, 2021).

Berdasarkan batasan masalah tersebut, berikut rumusan pertanyaan penelitian yang Penulis angkat:

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip *Ecological Civilization* sebagai visi Tiongkok dalam *global leadership* di program BRI di Indonesia?

2. Bagaimana kritik terhadap implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program BRI di Indonesia?

Dalam penelitian berjudul "Implementasi Prinsip *Ecological Civilization* dalam Program *Belt and Road Initiative* di Indonesia," penulis akan menggunakan tiga konsep sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah. Pertama adalah konsep EC akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana konsep EC Tiongkok diimplementasikan dalam kerangka program BRI di Indonesia. Selain itu, bantuan luar negeri juga akan dieksplorasi untuk memahami dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dalam konteks proyek-proyek BRI di Indonesia. Sedangkan konsep FDI akan menjadi fokus untuk menganalisis bagaimana investasi asing berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur BRI di Indonesia. Dengan memadukan ketiga konsep ini, penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang implementasi prinsip *Ecological Civilization* Tiongkok dalam program BRI di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam konteks tersebut. Pembahasan yang lebih rinci akan dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program BRI di Indonesia

2. Mengetahui kritik yang ditujukan kepada implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program BRI di Indonesia

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait prinsip *Ecological Civilization* yang dicetuskan oleh Tiongkok dan implementasinya dalam program *Belt and Road Initiative*, khususnya di Indonesia;
2. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis prinsip *Ecological Civilization* serta pengaruhnya terhadap implementasi program *Belt and Road Initiative*;
3. Sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi, maupun *stakeholders* lainnya yang bersangkutan dalam mengkaji implementasi prinsip *Ecological Civilization* dalam program *Belt and Road Initiative* di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep, yaitu konsep *Ecological Civilization* (EC), bantuan luar negeri, dan *foreign direct investment* (FDI) sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperjelas analisis. Berikut uraian dan relevansi konsep-konsep yang dimuat dalam penelitian ini, yakni:

### **a. Konsep *Ecological Civilization***

Istilah EC merujuk kepada konsep untuk mengintegrasikan tiga aspek; lingkungan, ekonomi, dan sosial dari pembangunan berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut digabungkan dengan menggunakan karakteristik politik, elemen pemerintahan, dan bagian inti dari rencana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Tiongkok. Bagi Tiongkok, konsep EC merupakan model bagi politik Tiongkok dalam membentuk pandangan terhadap sosialisme ekologi kontemporer (Kuhn, 2016). Arah pembangunan berkelanjutan Tiongkok dikemas dalam konsep ini. Bukan hanya menjadi konsep bagi kebijakan lingkungan domestik, tetapi konsep EC juga diperkenalkan sebagai *guiding principle* bagi Tiongkok dalam kepemimpinan global di isu lingkungan (Weatherley & Bauer, 2021). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konsep EC akan memainkan peran signifikan seiring dengan tujuan Tiongkok untuk menjadi bangsa terdepan bersamaan dengan modernisasi di tahun 2035 dan 2050 (Hanson, 2019).

Kemajuan pesat ekonomi Tiongkok sejak tahun 1980-an menyebabkan peningkatan dramatis polusi dan kerusakan lingkungan hidup dalam negeri. Merespons hal tersebut, Tiongkok memperkenalkan konsep atau sebuah ideologi yang dinamakan EC. Beberapa pakar menyatakan bahwa konsep EC merupakan "*coercive environmentalism*". Konsep ini memiliki tujuan strategis yang memiliki banyak aspek, mencakup pembangunan berkelanjutan, tata kelola politik, dan nilai-nilai

tradisional. Meskipun sering dikaitkan dengan kelestarian lingkungan, hal ini juga menjadi alasan bagi kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat otoritas para pemimpin dan Partai Komunis Tiongkok. Konsep ini memungkinkan para pejabat untuk membenarkan versi mereka tentang pembangunan berkelanjutan, yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kekuasaan negara (Harris, 2022).

EC berbeda dari paham liberal dalam isu lingkungan (*liberal environmentalism*) dalam penekanannya pada keterkaitan kepentingan lingkungan hidup dan komersial. Presiden Xi Jinping mendeskripsikan konsep EC dimana nilai lingkungan dan komersial merupakan dua hal yang memiliki nilai sama-sama penting. Hal ini berbeda dari gagasan dalam lingkungan hidup liberal yang melihat keduanya sebagai konsep yang berbeda dengan potensi konflik. Dibandingkan dengan pendekatan lingkungan liberal, konsep EC memperkuat hubungan saling menguntungkan antara pembangunan ekonomi dan upaya melindungi lingkungan (Wang, 2018).

Diidentifikasi bahwa pemikiran Presiden Xi Jinping mengenai konsep EC memiliki karakteristik marxisme. Asal-usul istilah EC berawal dari sebuah artikel yang ditulis oleh Qianji Ye, seorang ekonom pertanian, yang dipublikasikan dalam jurnal berbahasa Rusia pada tahun 1984. Kemudian, tulisan tersebut baru diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin

di tahun 1987 sekaligus menjadi pemicu bagi diskursus dengan menggunakan istilah EC. Konsep EC berakar dari pemikiran Marxis yang menekankan pentingnya sebuah ideologi bagi masyarakat untuk melawan dominasi kelas borjuis (Gare, 2021). Akhirnya, pemikiran konsep EC Presiden Xi Jinping didasarkan pada warisan filosofi ekologi Marxis dan pemikiran dialektis, dengan tujuan menggabungkan gagasan-gagasan tersebut dengan kondisi sosial yang ada di Tiongkok (Yan & Bocharnikov, 2022).

Berdasarkan analisis dan tinjauan kebijakan Tiongkok, Marxisme Ekologis, Pasca-modernisasi yang konstruktif serta kearifan dan modernitas tradisional Tiongkok; terdapat enam prinsip EC yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 1. Prinsip dan Indikator *Ecological Civilization*

<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>
Prinsip 1 - Ekonomi “hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan alam”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan yang berpusat pada manusia</li> <li>2. Mekanisme distribusi sumber daya</li> <li>3. Mencari nafkah bukan uang</li> <li>4. Pengukuran kemakmuran bukan PDB</li> </ol>
Prinsip 2 - Lingkungan “lingkungan alam sangat berharga (berharga dalam banyak hal) "perairan yang jernih dan pegunungan yang subur merupakan aset yang tak ternilai harganya””	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi penggunaan sumber daya</li> <li>2. Lingkungan hidup sebagai jantung pembangunan</li> <li>3. Mengikuti etika alam</li> <li>4. Harmoni antara ekonomi dan alam</li> </ol>
Prinsip 3 - Sosial “ekologi yang sehat adalah barang publik yang paling penting”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan untuk semua</li> <li>2. Tidak ada ketimpangan</li> <li>3. Tidak ada perbedaan kelas</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pendidikan universal</li> <li>5. Kesehatan universal</li> <li>6. Menghargai keberagaman</li> <li>7. Kohesi sosial</li> </ol>
<p>Prinsip 4 - Politik  “seluruh ekologi – gunung, sungai, hutan, lahan pertanian, danau, dan padang rumput – membentuk suatu komunitas kehidupan dan harus dikelola secara komprehensif dengan perspektif jangka panjang”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintahan yang inklusif</li> <li>2. Hukum yang setara</li> <li>3. Partisipasi terbuka</li> <li>4. Perlakuan yang adil terhadap semua</li> <li>5. Seleksi untuk pekerjaan atau meritokrasi</li> <li>6. hubungan dan koordinasi kelembagaan</li> </ol>
<p>Prinsip 5 - Budaya  “peraturan dan undang-undang yang paling ketat harus diterapkan dalam melindungi lingkungan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemikiran masyarakat</li> <li>2. Penghematan</li> <li>3. Tidak ada limbah</li> <li>4. Peduli terhadap individu</li> <li>5. Moralitas</li> <li>6. Etika</li> </ol>
<p>Prinsip 6 - Berbagi  “upaya bersama harus dilakukan untuk membangun peradaban ekologi global; Tiongkok harus "terlibat secara mendalam dalam tata kelola lingkungan hidup global””</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemakmuran bersama</li> <li>2. Masa depan bersama</li> <li>3. Takdir bersama</li> <li>4. Impian nasional</li> <li>5. Kemitraan</li> <li>6. Kerja sama yang saling menguntungkan</li> <li>7. Peduli terhadap keberagaman</li> </ol>

Sumber: Ramay, 2020

Dipandu oleh prinsip-prinsip EC dan pembangunan hijau, inisiatif untuk mewujudkan program BRI yang berwawasan hijau mengadopsi prinsip efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Hal ini diusahakan dalam upaya koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan bebas, integrasi keuangan dan sumber daya manusia, serta ikatan antar masyarakat (yang selanjutnya disebut sebagai 'Lima Tujuan'). Inisiatif ini juga memperhitungkan perlindungan lingkungan dalam

seluruh aspek dan proses pembangunan proyek BRI (Ministry of Ecology and Environment The People's Republic of China, 2017).

Konsep EC akan digunakan penulis sebagai kerangka utama dalam menganalisis aspek keberlanjutan program BRI di Indonesia. Dengan memperhatikan indikator yang ada dalam prinsip EC, penulis akan menyelidiki bagaimana proyek-proyek dalam kerangka BRI memperhatikan keberlanjutan sesuai dengan prinsip EC.

#### **b. Bantuan Luar Negeri**

Salah satu alat dalam diplomasi internasional adalah bantuan luar negeri. Peran bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri tetap menjadi fokus diskusi hingga saat ini. Sejumlah pihak meyakini bahwa bantuan luar negeri merupakan tujuan mandiri yang terlepas dari kebijakan luar negeri. Menurut perspektif ini, bantuan luar negeri dianggap sebagai pemenuhan kewajiban negara-negara maju terhadap negara-negara yang masih berkembang. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menolak kebutuhan akan bantuan luar negeri, menganggapnya sebagai suatu operasi yang boros, tidak beralasan, dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara pendonor maupun negara-negara penerima bantuan (Morgenthau, 1962).

Bantuan luar negeri merujuk pada penyaluran dana atau bantuan lainnya yang ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi suatu negara, bahkan terkadang untuk

memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan (Bindra, 2018). Banyak juga bantuan luar negeri yang bersifat politis dimana diharapkan bantuan ini akan memperluas kesempatan ekonomi negara pendonor. Di satu sisi, bantuan luar negeri mencerminkan upaya untuk mempengaruhi atau menciptakan hubungan saling ketergantungan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan (Goldstein & Pevehouse, 2014). Kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh negara menjadi faktor utama dalam bantuan luar negeri, menciptakan ketergantungan pada pihak eksternal (Bindra, 2018).

Kondisi ketergantungan antar negara terjadi karena setiap negara diberkati dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa negara kaya akan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya masih rendah. Beberapa negara lainnya kekurangan sumber daya alam, tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang maju. Salah satu kekuatan atau kelemahan suatu negara biasanya dicerminkan melalui kapasitas sumber daya alam yang dimiliki, terutama dalam bentuk bahan mentah. Variabel ini umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan militer, industri, dan ekonomi yang dapat diaktifkan untuk mencapai keuntungan politik, yang tentu saja mencakup tujuan kebijakan luar negeri (Holsti, 1978).

Bantuan luar negeri dapat dikatakan sebagai perilaku yang bertujuan mencari perubahan dari negara penerima terhadap negara pendonor agar hubungan bilateral menjadi lebih menguntungkan bagi negara pendonor (Palmer et al., 2002). Jika di antara negara-negara memiliki kemajuan teknologi yang sama, negara yang memiliki lebih banyak sumber daya alam akan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak (Bindra, 2018). Hal ini dicerminkan oleh negara-negara dengan kapasitas industri dan kekuatan militer yang besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa Barat. Dengan menggunakan narasi bantuan luar negeri, negara pendonor menanamkan kekuatan terhadap negara penerima donor. Bagi negara pendonor, bantuan luar negeri merupakan tindakan yang dapat memperkuat keamanan nasional negaranya (Liska, 1960).

Kepentingan jangka panjang suatu negara juga dapat dianalisis melalui program bantuan luar negeri yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Amerika Serikat yang memberikan bantuan luar negeri melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Pada usulan pembentukan USAID di tahun 1961, Presiden John F. Kennedy mengemukakan bahwa agenda pemberian bantuan luar negeri seharusnya bukan hanya berlandaskan alasan moral, kepentingan ekonomi, serta politik, tetapi juga untuk melindungi keamanan dan

kesejahteraan negara (Kennedy, 1961). Pernyataan ini membentuk hubungan bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat dengan keamanan nasionalnya dalam jangka panjang, yaitu memajukan kehidupan sosial dan pembangunan ekonomi secara bertahap, bantuan luar negeri akan melawan pengaruh Uni Soviet, dan pada akhirnya membuat Amerika Serikat lebih aman dan sejahtera (Myers, 2015).

Melalui pendekatan yang terintegrasi terhadap bantuan luar negeri ini, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk mempercepat perkembangan ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan aktor yang menerima bantuan; (1) bantuan terhadap rumah tangga, (2) bantuan terhadap pemerintah, (3) bantuan terhadap sektor swasta (Ahmed, 2014). Bantuan terhadap rumah tangga dapat memberikan dukungan langsung kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli. Selanjutnya, bantuan yang diberikan kepada pemerintah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan program-program pembangunan nasional lainnya. Terakhir, bantuan terhadap sektor swasta dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Sebagian besar

bantuan luar negeri diberikan kepada pemerintah untuk kemudian digunakan sebagai pendanaan investasi publik (Sachs, 2005).

Selanjutnya, bantuan luar negeri juga dapat dibagi berdasarkan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut; (1) bantuan luar negeri bilateral, dan (2) bantuan luar negeri multilateral. Bantuan luar negeri bilateral merupakan bantuan yang bersifat dua arah antara pendonor dan penerima donor. Bantuan bilateral diwakilkan oleh pemerintah negara (The Organization for Economic Cooperation and Development, n.d.). Sedangkan, bantuan luar negeri multilateral adalah bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional atau lembaga multilateral, seperti PBB, *World Bank*, dan *Asian Development Bank*. Sumber dana diperoleh dari beberapa negara kemudian dikelola oleh organisasi internasional tersebut untuk diberikan ke negara-negara dengan tujuan mengatasi isu global, seperti konflik besar, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa terselip kepentingan negara pendonor dalam pemberian bantuan luar negeri. Kepentingan ini bermacam-macam sebagai berikut; (1) kepentingan ekonomi, (2) kepentingan keamanan, (3) kepentingan geopolitik, (4) kepentingan politik, dan (5) tujuan kemanusiaan. Bagi negara pendonor, memberikan bantuan luar negeri dapat didasarkan pada kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang terdapat di negara

penerima donor dan mendorong perdagangan bebas antar negara. Bantuan berdasarkan kepentingan keamanan biasanya dilakukan untuk mencegah konflik dalam sebuah kawasan yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional negara pendonor. Bantuan luar negeri yang dilakukan berdasarkan kepentingan geopolitik bertujuan untuk memperluas pengaruh negara pemberi bantuan dalam sebuah kawasan. Jika dilihat dari bantuan berdasarkan kepentingan politik, faktornya bermacam-macam, seperti menjadi *superpower* dalam sebuah kawasan dan menanamkan ideologi yang sesuai dengan negara pendonor. Terakhir, bantuan luar negeri yang dilakukan berdasarkan tujuan kemanusiaan dilaksanakan untuk merespon krisis dan mendorong perdamaian dunia.

Klasifikasi bantuan luar negeri juga dapat ditinjau berdasarkan intensi atau kondisi dalam pemberian bantuan luar negeri. Adapun bantuan luar negeri berdasarkan klasifikasi tersebut adalah; (1) altruistik, (2) kondisional, (3) mendesak. Bersifat altruistik maksudnya adalah negara pendonor memberikan bantuan luar negeri tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan dari negara penerima donor. Biasanya bantuan seperti ini diberikan dalam konteks dimana terjadi bencana alam dan kebutuhan bantuan kemanusiaan di negara penerima. Selanjutnya adalah bantuan luar negeri bisa bersifat kondisional dimana bantuan diberikan kepada sebuah negara dengan syarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan.

Contohnya adalah memenuhi standar kualitas demokrasi untuk menerima bantuan dari negara atau organisasi pendonor. Terakhir, bantuan luar negeri yang bersifat mendesak merupakan bantuan yang diberikan apabila terjadi konflik atau bencana alam sehingga negara membutuhkan bantuan dalam waktu singkat.

Akan tetapi, klasifikasi yang tak kalah penting untuk dikaji adalah bantuan luar negeri berdasarkan jenis bantuan finansial yang diberikan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Utang

Bantuan luar negeri dapat diberikan dalam bentuk utang luar negeri. Bentuk utang luar negeri dapat berupa uang atau aset lainnya. Utang luar negeri merupakan bantuan berupa program dan proyek yang diterima dari negara lain. Utang luar negeri menjadi opsi pendanaan yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan investasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi (Annisa et al., 2022). Pengembalian utang dari negara penerima pinjaman kepada negara pemberi pinjaman dapat berupa keuntungan negara yang diperoleh dari pajak, ekspor, atau kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Utang luar negeri kerap kali dimiliki oleh negara berkembang yang tidak memiliki kapital untuk mengolah sumber daya yang ada di

negaranya. Apalagi, negara-negara berkembang mengalami berbagai tekanan untuk memajukan ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara. Mengingat tekanan dan ketidakpastian ini terkait dengan peristiwa ekonomi di tingkat domestik dan internasional, tidak mengherankan bahwa beberapa negara berkembang mungkin membuat kesalahan dalam menilai kemampuan mereka untuk membayar utang. Akibatnya, mereka mungkin cenderung meminjam lebih banyak dan dengan persyaratan yang lebih sulit, yang dapat mengakibatkan resiko menggadaikan masa depan mereka dengan kewajiban pembayaran yang mungkin sulit dipenuhi tanpa melakukan pemangkasan yang tidak wajar terhadap tujuan pembangunan mereka (Kroller, 1978).

Utang luar negeri memiliki beragam jenis yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, terdapat hutang publik yang merupakan kewajiban finansial yang dimiliki oleh pemerintah kepada kreditur luar negeri. Kedua, ada hutang luar negeri sektor swasta yang tidak dijamin, yang melibatkan kewajiban finansial dari perusahaan atau individu di negara yang bersangkutan kepada kreditur internasional. Ketiga, deposito bank sentral juga menjadi salah satu bentuk utang luar negeri yang mencerminkan dana yang disimpan oleh bank sentral di luar negeri. Terakhir, terdapat pinjaman

dari lembaga internasional, yang melibatkan pemberian dana oleh organisasi seperti *International Monetary Fund* atau *World Bank* kepada negara-negara anggota untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa negara yang mengalami penumpukan utang akan kesulitan untuk menarik investor baru ke negaranya. Hal ini terjadi karena investor mempertimbangkan bahwa *return* investasi yang didapatkan tidak akan sebanding dengan utang yang diberikan ke negara tersebut (Arslanalp & Henry, 2006). Keengganan investor untuk terlibat dalam situasi tersebut dapat menciptakan spiral negatif, di mana ketidakmampuan negara untuk menarik modal baru dapat memperburuk keadaan ekonominya, merugikan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor kunci. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan keuangan yang bijak dan berkelanjutan guna memitigasi risiko akumulasi utang yang dapat menghambat daya tarik investasi mereka.

## 2. Hibah

Berbeda dengan utang luar negeri dimana dana yang diterima harus dikembalikan kepada negara pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian, hibah luar negeri sifatnya lebih altruistik. Artinya, pendonor yang merupakan negara atau lembaga internasional tidak

mengharapkan pengembalian dana dari negara penerima bantuan. Hibah sebagai bantuan luar negeri memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kemanusiaan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan membina solidaritas internasional. Pemberian hibah dapat didasarkan hal-hal berikut; (1) alasan kemanusiaan, (2) program khusus, dan (3) pembangunan.

Pemberian hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan agenda prioritas pemberi hibah. Maka dari itu, negara penerima hibah harus memastikan bahwa hibah yang diberikan memang digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya hibah serta menyediakan transparansi dalam pelaporan penggunaan hibah.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika ditinjau dari jenis bantuan finansial yang diberikan, bantuan luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu utang dan hibah. Penulis akan menggunakan konsep bantuan luar negeri yang diterima dalam bentuk utang. Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik implementasi prinsip EC dalam proyek BRI yang dilakukan dalam bentuk bantuan luar negeri berupa utang, yaitu KCIC.

**c. Penanaman Modal Asing/*Foreign Direct Investment (FDI)***

FDI merujuk pada investasi di mana investor dari satu negara memiliki kepentingan jangka panjang dan pengaruh yang besar pada

perusahaan di negara lain. FDI menjadi hal yang penting dalam menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang stabil dan berkelanjutan. FDI memiliki peran vital dalam mentransfer teknologi antar negara, mendorong perdagangan internasional dengan memberikan akses ke pasar luar negeri, dan dapat menjadi sarana utama dalam mendukung pembangunan ekonomi (OECD iLibrary, 2023). Secara signifikan, FDI membuka pintu terhadap perdagangan internasional dengan membuka akses terhadap pasar asing.

Awal dari FDI adalah ketika sebuah perusahaan menanamkan modal terhadap perusahaan yang berada di luar wilayahnya (Hindrayani, 2013). Tujuan dari FDI adalah untuk mengontrol dan manajemen perusahaan yang mendapatkan investasi. FDI dapat dilakukan antar individu maupun entitas bisnis (Susilo, 2018). Pemerintah bisa menghalangi atau mengurangi investasi asing dengan mengatur seberapa banyak kepemilikan yang diizinkan, menetapkan tarif pajak yang tinggi, dan memberlakukan sanksi kepada investor. Sebaliknya, pemerintah dapat mendorong minat investor asing melalui insentif keuangan, pembangunan infrastruktur yang kuat, menyederhanakan proses administrasi dan peraturan yang jelas, meningkatkan investasi di sektor pendidikan, serta menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan hukum (Cangara, 2021).

FDI biasanya merupakan investasi jangka panjang. FDI berbeda dengan investasi portofolio dimana pemodal asing memperoleh kepemilikan dalam perusahaan lokal namun tidak secara langsung mengendalikan perusahaan tersebut (Hindrayani, 2013). Maka dari itu, investasi portofolio bersifat jangka pendek. Pemodal asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam FDI karena mereka terlibat langsung dalam manajemen perusahaan sehingga bisa berperan dalam arah kebijakan bisnis yang akan diambil. Sedangkan dalam investasi portofolio, investor tidak dilibatkan dalam manajemen perusahaan meskipun tetap mendapatkan keuntungan dari bisnis yang beroperasi.

Banyak ahli yang meyakini bahwa memiliki setidaknya 25% kepemilikan dalam perusahaan dianggap sebagai tingkat partisipasi yang cukup bagi investor asing dalam mengendalikan perusahaan. Meskipun secara umum, investor asing setidaknya memiliki 10% kepemilikan untuk mendapatkan sebagian kontrol dalam perusahaan. Karakteristik dari FDI adalah; (1) investor asing memiliki hak untuk mengontrol bisnis, dan (2) investor asing memiliki hak dalam bagi hasil (Kukaj & Ahmeti, 2016).

Berdasarkan sudut pandang investor, terdapat dua jenis FDI, yaitu *Domestic Market Oriented* atau FDI Horizontal dan *Export Oriented* atau FDI Vertikal. FDI horizontal adalah dimana perusahaan membuka cabang di negara lain untuk menghemat biaya produksi (Romondo et al., 2011).

Pada kasus ini, perusahaan menjalankan bisnis yang sama, tetapi di negara lain. Misalnya adalah perusahaan Grab yang berasal dari Singapura dan membuka bisnis di Indonesia. Sedangkan, FDI vertikal merujuk pada perusahaan multinasional yang memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan di luar negeri dan terlibat secara signifikan dalam mengelola operasi bisnis tersebut. Contohnya adalah perusahaan Apple Inc. yang melakukan produksi di berbagai belahan dunia.

Pembagian keuntungan dalam FDI terjadi dalam berbagai model sebagai berikut: (1) *whole owned subsidiary*, yaitu saham perusahaan 100% dimiliki oleh perusahaan induk, (2) *equity joint venture*, merupakan kesepakatan antara dua perusahaan atau lebih untuk membagi kepemilikan dan keuntungan berdasarkan perjanjian, (3) *royalties and licensing fees*, yaitu perusahaan melakukan pembayaran untuk royalti atau lisensi atas teknologi atau properti intelektual lainnya yang digunakan, (4) *performance-based incentives*, merupakan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan performa dan kesuksesan operasi bisnis, dan terakhir (5) *contractual agreement*, yaitu bagi hasil dilakukan berdasarkan kontrak dan bersifat *legally binding*.

Berdasarkan penjelasan diatas, konsep FDI memiliki beragam kategorisasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep FDI dalam bentuk *joint venture* untuk menganalisis salah satu program BRI

yang dilaksanakan dalam bentuk patungan, yaitu IMIP. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami implikasi lingkungan dari investasi asing dalam infrastruktur dan proyek pembangunan yang dilaksanakan dalam kerangka BRI di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampak keseluruhan dari program tersebut.

#### d. Operasional Variabel

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Variabel Independen	Kategori	Indikator
Program <i>Belt and Road Initiative</i> di Indonesia	Kebijakan <i>Ecological Civilization</i>	Prinsip 1 - Ekonomi “hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan alam”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembangunan yang berpusat pada manusia</li> <li>● Mekanisme distribusi sumber daya</li> <li>● Mencari nafkah bukan uang</li> <li>● Pengukuran kemakmuran bukan PDB</li> </ul>
		Prinsip 2 - Lingkungan “lingkungan alam sangat berharga (berharga dalam banyak hal) "perairan yang jernih dan pegunungan yang subur merupakan aset yang tak ternilai harganya”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membatasi penggunaan sumber daya</li> <li>● Lingkungan hidup sebagai jantung pembangunan</li> <li>● Mengikuti etika alam</li> <li>● Harmoni antara ekonomi dan alam</li> </ul>
		Prinsip 3 - Sosial “ekologi yang sehat adalah barang publik yang paling penting”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesejahteraan untuk semua</li> <li>● Tidak ada ketimpangan</li> <li>● Tidak ada perbedaan kelas</li> <li>● Pendidikan universal</li> <li>● Kesehatan universal</li> <li>● Menghargai keberagaman</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kohesi sosial</li> </ul>
		Prinsip 4 - Politik “seluruh ekologi – gunung, sungai, hutan, lahan pertanian, danau, dan padang rumput – membentuk suatu komunitas kehidupan dan harus dikelola secara komprehensif dengan perspektif jangka panjang”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintahan yang inklusif</li> <li>● Hukum yang setara</li> <li>● Partisipasi terbuka</li> <li>● Perlakuan yang adil terhadap semua</li> <li>● Seleksi untuk pekerjaan atau meritokrasi</li> <li>● hubungan dan koordinasi kelembagaan</li> </ul>
		Prinsip 5 - Budaya “peraturan dan undang-undang yang paling ketat harus diterapkan dalam melindungi lingkungan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemikiran masyarakat</li> <li>● Penghematan</li> <li>● Tidak ada limbah</li> <li>● Peduli terhadap individu</li> <li>● Moralitas</li> <li>● Etika</li> </ul>
		Prinsip 6 - Berbagi “upaya bersama harus dilakukan untuk membangun peradaban ekologi global; Tiongkok harus "terlibat secara mendalam dalam tata kelola lingkungan hidup global"”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemakmuran bersama</li> <li>● Masa depan bersama</li> <li>● Takdir bersama</li> <li>● Impian nasional</li> <li>● Kemitraan</li> <li>● Kerja sama yang saling menguntungkan</li> <li>● Peduli terhadap keberagaman</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

### e. Model Analisis



## E. Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Penulis memilih pendekatan kualitatif deskriptif analitik untuk penelitian ini dengan tujuan memperoleh gambaran dan karakteristik tentang suatu fenomena. Metode ini mengarah pada pengungkapan siapa,

apa, kapan, di mana, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Analisis kualitatif digunakan untuk menyusun fakta-fakta yang ditemukan dari data dan membangun argumen yang kuat berdasarkan hasil temuan tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang tidak siap untuk dikuantifikasi. Hasilnya bersifat faktual dan empiris (Fauzi et al., 2022).

#### **b. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara. Jenis data ini mencakup tanggapan atas pertanyaan penelitian dan dikumpulkan langsung dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam subjek penelitian (Kabir, 2016). Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan sumber informasi yang bersangkutan. Sedangkan, data sekunder merupakan informasi yang tersedia untuk umum dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk penelitian mereka. Ini bisa berupa berbagai jenis sumber, termasuk dokumen, laporan, artikel jurnal, dataset, atau informasi lainnya yang telah tersedia sebelumnya dan dapat digunakan kembali.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan studi pustaka atau riset perpustakaan untuk menghimpun data penelitian ini. Sumber literatur yang relevan dengan

topik penelitian akan dieksplorasi, termasuk buku-buku, jurnal, dokumen, berbagai situs web di internet, artikel surat kabar, serta laporan resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, untuk memperoleh data primer, penulis akan mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan sumber pertama, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Penulis akan memanfaatkan teknik analisis kualitatif untuk mengevaluasi data penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menyusun fakta-fakta yang relevan dengan area penelitian untuk membentuk argumen yang kohesif dan terintegrasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Teknik ini juga akan digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan data statistik atau angka yang mendukung argumen penelitian serta hasil akhirnya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

- **BAB 1 Pendahuluan** yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

- **BAB 2 Tinjauan Pustaka** akan menjelaskan lebih jauh mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep EC, bantuan luar negeri, dan *foreign direct investment*.
- **BAB 3 Gambaran Umum** membahas mengenai prinsip EC dan program BRI di Indonesia.
- **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** pada bab ini operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.
- **BAB 5 Penutup** berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan mengeksplor tinjauan pustaka dari konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Konsep tersebut terdiri dari *ecological civilization*, bantuan luar negeri, dan *foreign direct investment*. Tujuan dari bab ini adalah memberikan kerangka teoritis sebagai landasan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan.

#### **A. Konsep *Ecological Civilization***

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi dalam kapitalisme harus ditentang sehingga lahirlah pemikiran EC. Konsep EC dapat diinterpretasikan sebagai solusi dari permasalahan industrialisasi dengan menggunakan teknologi, seperti yang terjadi di negara-negara Barat (Gare, 2020). Dipahami bahwa dorongan awal dari konsep EC adalah sebagai reaksi dari kebangkitan kapitalisme yang terjadi pasca-reformasi di Tiongkok dan diyakini sebagai prinsip yang mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Gare, 2012). Konsep ini berpendapat bahwa kapitalisme tidak dapat disesuaikan dengan keberlanjutan karena itu adalah sistem yang terus memperluas dan mendorong konsumsi, tanpa memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan bumi untuk mengatasi limbah (Zhu & Lo, 2022). Konsep EC bertolak belakang dengan kapitalisme dari segala aspek yang meliputi berkembang secara terkendali, tidak mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi berlebihan, melindungi ekosistem dan memiliki batas,

keputusan berdasarkan kebutuhan jangka panjang, menumbuhkan budaya kerja sama, serta pengambilan keputusan yang demokratis (Gheng & Lo, 2023).

Konflik antara konsep EC dan kapitalisme muncul karena EC berakar dari pandangan Marxis yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Marx mengatakan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketergantungan manusia pada alam tidak terpisahkan dari hubungan sosialnya. Marx juga menekankan bahwa kemajuan tidak dapat dicapai dengan cara menaklukkan alam semata. Selain itu, dia mengidentifikasi kapitalisme sebagai akar masalah ekologi karena di bawah sistem ini, keuntungan ekonomi diprioritaskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan prinsip-prinsip perkembangan alamiah. Pasca-revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara kapitalis berkembang pesat dalam penguasaan teknologi tinggi, memungkinkan eksploitasi alam yang lebih dalam. Namun, penggunaan berlebihan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui untuk memenuhi kebutuhan kapitalis berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak dapat diperbaiki dalam jangka panjang (Wang et al., 2015).

Istilah “*Ecological Nature*” awalnya dipromosikan oleh pendukung Marxisme di Uni Soviet hingga kemudian populer digunakan sejak tahun 1970-an. Kemudian istilah ini disesuaikan dengan nilai-nilai kebudayaan Tiongkok sehingga berkembang menjadi “*Ecological Civilization*”. Seruan untuk mewujudkan EC di Tiongkok dan Rusia, yang berakar dari upaya pencarian

budaya ekologis di Uni Soviet, merupakan bagian dari gerakan global yang lebih besar melibatkan ilmuwan dan filsuf radikal yang berjuang, sering kali menghadapi resistensi intelektual, untuk mengembangkan bentuk-bentuk pemikiran yang mendukung kesadaran akan perlunya menciptakan dan melegitimasi sosialisme, dengan masyarakat memiliki kendali atas nasib mereka sendiri dan diakui sebagai partisipan kreatif dalam pembentukan masyarakat yang kreatif (Gare, 2020). Konsep EC mengandung prinsip fundamental untuk menentang kapitalisme.

EC adalah konsep yang terinspirasi oleh interpretasi khusus dari warisan filosofi Tiongkok yang mengarah pada sebuah pandangan global yang terhubung erat dengan identitas nasional (Hansen et al., 2018). Hal ini tercermin dari beberapa pendapat pakar dari Tiongkok tentang EC yang menyampaikan bahwa Tiongkok memiliki warisan kuno dalam mengatur ekonomi yang bisa menjadi contoh dalam menghadapi masalah konsumerisme modern yang dipengaruhi oleh pemikiran dan kemajuan industri di negara-negara Barat (Pan, 2003). Meskipun konsep EC terkesan radikal karena menentang kapitalisme dan konsumerisme, tetapi tidak ada dokumen yang merujuk bahwa EC merupakan konsep yang radikal, misalnya dengan memperlambat produksi untuk mencegah kerusakan lingkungan (Hansen et al., 2018). Konsep EC merupakan konsep yang beradaptasi dengan tatanan kapitalisme dunia saat ini dan tidak menunjukkan langkah radikal sehingga dapat diimplementasikan secara global.

Proponen kapitalisme kemudian mengkritik gagasan dari EC dengan berpendapat bahwa krisis ekologi datang dari hal tersebut. Akan tetapi, apabila kapitalisme merupakan penyebab dari krisis ekologi seperti yang dikemukakan oleh marxis maka kenapa negara sosialis seperti Tiongkok memiliki masalah ekologi yang lebih parah dibandingkan negara-negara kapitalis Barat? (Zongliang, 2011). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa dekade terakhir kerusakan lingkungan di Tiongkok sama parahnya dengan negara yang menganut kapitalisme. Selain itu, kritikus berpendapat bahwa menyebut tradisi filosofis Tiongkok sebagai *environmentalist* sudah ketinggalan zaman. Pandangan ekosentris serupa terdapat dalam pemikiran pra-industri secara global, yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang keterhubungan alam dengan kehidupan manusia. Beberapa orang menafsirkan gagasan ini sebagai langkah strategis yang dilakukan Tiongkok untuk memberikan legitimasi terhadap inisiatif lingkungan hidup dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang telah lama ada (Westman & Huang, 2022).

Konsep EC juga dikaitkan dengan *coercive environmentalism*. Menurut Lila Buckley dari *International Institute for Environment and Development*, EC dipandang sebagai tujuan sosio-ekonomi yang strategis tingkat tinggi bagi pemerintah Tiongkok. Buckley menegaskan bahwa tujuan dari konsep ini adalah untuk memperkuat kekuasaan pemimpin individu dan memperluas pengaruh Partai Komunis Tiongkok (Harris, 2022). Dalam konsep EC di Tiongkok,

menentang partai atau pemerintah sama saja dengan menentang kelestarian lingkungan. Konsep EC memaksakan justifikasi atas tindakan pemerintah yang bisa saja merugikan bagi beberapa kelompok. Hal ini menciptakan perdebatan bahwa konsep EC tidak demokratis.

## **B. Bantuan Luar Negeri**

Di bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa klasifikasi bantuan luar negeri. Bagian ini kemudian akan memberikan pemaparan lebih jauh mengenai bantuan luar negeri.

Definisi bantuan luar negeri berdasarkan standar yang diberikan oleh *Development Assistance Committee (DAC)* dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* adalah bantuan dalam bentuk finansial, teknis, dan komoditas yang; (1) mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sebagai objektif utama, dan (2) disediakan sebagai hibah atau subsidi utang. Utang dikategorikan sebagai bantuan apabila memiliki besaran hibah sebesar 25% atau lebih. Selanjutnya, DAC mengklasifikasi aliran bantuan menjadi tiga kategori; (1) *Official Development Assistance (ODA)*, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah negara untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah, (2) *Official Assistance (OA)*, yaitu bantuan untuk negara dengan pendapatan perkapita lebih tinggi dari kurang lebih 9.000 USD, dan (3) *Private Voluntary Assistance*, yaitu hibah dari berbagai sumber, seperti *non-governmental organization*, perusahaan swasta, dan sebagainya (Radelet, 2006).

Bantuan luar negeri dapat dikatakan sebagai simbol dominasi. Alasannya adalah karena terdapat kesenjangan sumber daya antara negara pendonor dan penerima donor. Bantuan luar negeri merupakan sinyal dari hierarki sosial dimana negara pendonor memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan penerima donor. Dalam pandangan Bourdieu, memberi bantuan merupakan praktek dari simbol dominasi karena ini melibatkan alokasi sumber daya yang diinginkan oleh penerima bantuan (Hattori, 2001).

Bantuan luar negeri juga dapat dikatakan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kebijakan luar negeri seringkali didominasi alasan kekhawatiran isu keamanan sehingga bantuan luar negeri dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat keamanan negara (Apodaca, 2017). Bagi negara pendonor, bantuan luar negeri dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh dan mencapai kerja sama dalam berbagai isu dengan negara penerima donor. Bantuan luar negeri memberikan akses bagi negara pendonor untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan urusan lain sebuah negara (Apodaca, 2006).

Akan tetapi, terdapat skeptisisme terhadap bantuan luar negeri. Efektivitas bantuan luar negeri masih diperdebatkan, apakah bantuan luar negeri benar-benar mengurangi kemiskinan dan permasalahan global lainnya. P. T. Bauer, seorang ekonom, mengkritisi bantuan luar negeri selama bertahun-tahun. Hal ini juga dilakukan oleh Peter Boone. Ia berpendapat bahwa bantuan luar negeri dalam

jangka panjang tidak bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak akan terjadi karena dua hal; 1) Kemiskinan bukan terjadi karena kekurangan modal, dan 2) Bantuan tidak maksimal karena penyimpangan kebijakan oleh politisi (Bandow, 2002).

Perdebatan mengenai bantuan luar negeri juga dapat dikaji melalui pemikiran kiri dan kanan (Therien, 2002). Dari perspektif kiri, bantuan luar negeri sering dilihat sebagai alat untuk memperkuat dominasi kapitalisme global dan menjaga ketimpangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin. Sebaliknya, dari perspektif kanan, bantuan luar negeri dapat dipandang sebagai bentuk solidaritas antarbangsa dan alat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan stabilitas. Kajian ini menggambarkan kerangka pemikiran yang kompleks yang mendasari perdebatan tentang efektivitas, keadilan, dan kebijakan bantuan luar negeri secara umum.

Bantuan luar negeri dapat diterima dalam bentuk utang seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Pemberian utang dianggap menguntungkan bagi negara pendonor maupun negara penerima pinjaman. Negara-negara yang termasuk dalam kategori berpendapatan rendah hingga menengah seringkali harus meminjam dana dari sumber lain, seperti negara lain dan institusi internasional untuk melakukan pembangunan. Faktanya adalah utang bagi negara berkembang seringkali dimanfaatkan untuk membiayai transisi iklim (Hogan, 2024).

### ***C. Foreign Direct Investment***

Banyak ahli yang meyakini bahwa memiliki setidaknya 25% kepemilikan dalam perusahaan dianggap sebagai tingkat partisipasi yang cukup bagi investor asing dalam mengendalikan perusahaan. Meskipun secara umum, investor asing setidaknya memiliki 10% kepemilikan untuk mendapatkan sebagian kontrol dalam perusahaan. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, FDI secara definitif dapat dikatakan bila: (1) investor asing memiliki hak untuk mengontrol bisnis, dan (2) investor asing memiliki hak dalam bagi hasil (Kukaj & Ahmeti, 2016).

Investasi asing langsung (FDI) umumnya merupakan komitmen investasi jangka panjang, berbeda dengan investasi portofolio dimana investor asing membeli saham perusahaan lokal tanpa memiliki kendali langsung atas manajemennya. Hal ini menjadikan investasi portofolio cenderung bersifat sementara. Pemodal asing memiliki pengaruh yang substansial dalam FDI karena mereka terlibat aktif dalam mengelola perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan bisnis. Di sisi lain, dalam investasi portofolio, investor tidak memiliki peran dalam manajemen perusahaan meskipun mereka tetap memperoleh keuntungan dari operasinya. Perusahaan melakukan FDI untuk meningkatkan nilai kompetitif dalam pasar global serta mencari peningkatan keuntungan (Dadkhah, 2021).

Para ahli memperdebatkan berbagai aspek FDI, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, transfer teknologi, dan

kedaulatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penanaman modal asing memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dengan mendatangkan modal, keahlian, dan teknologi, merangsang pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Pihak lain menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif penanaman modal asing, seperti eksploitasi tenaga kerja, degradasi lingkungan, dan hilangnya kedaulatan perusahaan multinasional. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai peran kebijakan pemerintah dalam menarik dan mengatur FDI, serta efektivitas FDI dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Secara keseluruhan, perdebatan seputar FDI mempunyai banyak segi dan mencerminkan perbedaan perspektif mengenai manfaat dan kerugiannya (Cangara,2021).

Pengamat menyatakan bahwa FDI memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di pasar global, mengundang investasi modal, dan menciptakan peluang kerja di sebuah negara. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa FDI mungkin juga mengurangi daya saing bisnis lokal, terutama jika investor asing dominan dalam industri tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan yang lebih besar pada modal dan teknologi asing, serta mengurangi ruang bagi pengembangan bisnis lokal yang mandiri. Misalnya, FDI yang dilakukan oleh Tiongkok di Amerika Serikat menjadi tantangan bagi ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat (Congressional Research Service, 2024).

Secara garis besar, terdapat dua bentuk FDI yaitu *greenfield investment* dan akuisisi atau merger. *Greenfield investment* adalah proses mendirikan operasi baru dari awal di luar negeri, baik dalam bentuk perusahaan baru maupun cabang perusahaan yang belum ada sebelumnya. Dalam investasi jenis ini, investor memiliki kendali tertinggi dalam menggerakkan investasinya (Ha et al., 2021). Investasi seperti ini merupakan opsi yang seringkali diizinkan oleh negara yang mendukung secara penuh investasi, seperti memperbolehkan kontrol penuh bagi investor serta memberikan perlindungan bagi investor. Sedangkan, akuisisi atau merger merupakan kegiatan FDI yang perlu melibatkan perusahaan lokal untuk menjalankan bisnisnya di luar wilayah *headquarter*.

Dalam prakteknya lebih banyak kegiatan FDI yang dilakukan melalui akuisisi dibandingkan *greenfield investment*. Hal ini terjadi karena akuisisi memiliki proses yang lebih cepat daripada *greenfield investment*. Kemudian, jika dibandingkan dengan membangun aset dari nol, tentu saja perusahaan lebih memilih opsi yang mudah dan aman untuk mengekspansi usahanya. Selain itu, kemampuan untuk melakukan transfer kapital merupakan pilihan yang dianggap dapat meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan (Cangara, 2021).

Namun, opsi untuk melakukan *greenfield investment* atau akuisisi tergantung dari kondisi pasar yang ingin dimasuki. Apabila telah terdapat kompetitor, akuisisi dianggap sebagai pilihan yang lebih aman. Jika belum terdapat kompetitor, perusahaan biasanya memilih opsi *greenfield investment*.

Pada dasarnya, perusahaan memiliki ketertarikan yang lebih tinggi untuk melakukan FDI dibandingkan mengekspor produknya atau menjual lisensi kepada pihak lain (Cangara, 2021). Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Perusahaan menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatan ekonomi lintas negara, termasuk hambatan tarif ekspor dan lisensi yang dianggap merugikan. Kendala ini membatasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Meskipun dianggap memiliki berbagai keunggulan, FDI juga menimbulkan resiko bagi investor. Misalnya, FDI akan memiliki risiko yang tinggi di negara yang mengalami ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi, sehingga mengurangi motivasi bagi investor asing untuk berinvestasi di negara tujuan investasi (Khan & Akbar, 2013). Selain kondisi politik, keadaan ekonomi yang tidak menentu juga menjadi resiko dalam melakukan FDI.

Bagi negara penerima FDI, FDI memiliki sejumlah keunggulan. Diantaranya adalah FDI mendorong proses transfer sumber daya, memperluas lapangan pekerjaan, memberikan efek positif pada neraca pembayaran, serta mendorong kompetisi dan pertumbuhan ekonomi negara (Cangara, 2021). Di sisi lain, FDI juga memberikan dampak negatif bagi negara penerima investasi, seperti dampak lingkungan khususnya dalam industri berat, dampak sosial, serta ketidakmampuan perusahaan lokal untuk bersaing dengan *multinational companies* (MNCs).

Beberapa negara juga memandang FDI sebagai pengganggu kedaulatan nasional (OECD, 2002).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Hal ini dilakukan agar dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, penelitian mengenai prinsip EC dalam program BRI telah dilakukan oleh Bjørn Leif Brauteseth dan Dan Banik dengan penelitian yang berjudul *“Transplanting China's ecological civilization to the Belt and Road Initiative: What will it take?”*. Penelitian ini mengkaji konsep EC yang sedang berkembang di Tiongkok, serta mendalami bagaimana EC dibangun dengan mengacu pada prinsip-prinsip organisasi tertentu yang sulit diimplementasikan tanpa memperluas pengaruh politik Beijing di luar negeri. Melalui studi kasus pembangkit listrik tenaga batu bara di Kenya, penelitian ini juga mengeksplorasi potensi bagi para pemangku kepentingan di Afrika untuk menggunakan pengaruhnya agar pihak-pihak Tiongkok mempertimbangkan prinsip-prinsip normatif yang dianut oleh Tiongkok.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun Tiongkok telah mengadopsi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penerapan EC dalam sistem organisasi Leninisnya menekankan kepedulian terhadap lingkungan dan perlindungan hukum. Namun, sejauh mana Tiongkok akan menerapkan standar ini di Afrika masih belum pasti di tengah kekhawatiran tentang diplomasi utang dan penolakan dari masyarakat lokal. Selain itu, ketiadaan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme kompensasi menimbulkan tantangan, namun ideologi EC dapat menawarkan para pemangku kepentingan di Afrika cara untuk menuntut pertanggungjawaban dari aktor-aktor Tiongkok dan menyesuaikan standar lingkungan dengan konteks nasional mereka.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang berkaitan adalah penelitian yang ditulis oleh Qingge Geng dan Kevin Lo dengan judul “*Global ecological civilization: An analysis of macro-level policies of the Belt and Road Initiative*”. Penelitian ini secara faktual menginvestigasi cara pengintegrasian konsep EC ke dalam BRI. Peneliti melakukan analisis konten tematik terhadap panduan kebijakan tingkat makro yang mencakup inti dari BRI serta menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan spesifik sektor lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan struktur program BRI mempresentasikan pandangan yang berbeda terhadap EC dibandingkan dengan interpretasi domestiknya. Namun, ada kesamaan antara wacana domestik dan internasional dalam penekanan pada penggunaan teknologi untuk mengatasi tantangan lingkungan, menunjukkan

bahwa BRI mendorong promosi teknologi dan industri ramah lingkungan Tiongkok di luar negeri.

Usaha untuk melakukan pendalaman mengenai bagaimana konsep EC digunakan dalam program BRI juga pernah dibahas oleh Peter Corne dan Vivien Zhu dalam penelitian yang berjudul “*Ecological Civilization and Dispute Resolution in the BRI*”. Dalam penelitiannya, Corne dan Zhu fokus membahas tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam menjalankan program BRI, khususnya dalam menghadapi kompleksitas interaksi dengan beragam budaya, ekosistem, masyarakat, dan hukum terkait. Artikel tersebut berpendapat bahwa konsep peradaban ekologis secara alami mencakup berbagai norma budaya, mendorong pendekatan inklusif terhadap keragaman budaya dan ekologi.

Penelitian menyimpulkan bahwa konsep EC, yang berakar dalam ajaran kuno Tiongkok, memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan tradisi budaya dan agama lainnya di sepanjang jalur dalam kerangka BRI. Prinsip-prinsip ini menekankan harmoni masyarakat dan keberadaan bersama dengan alam. Dengan menggunakan mediator yang memahami budaya dan lingkungan, sengketa dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan faktor budaya dan ekologis, sesuatu yang sulit dalam model penyelesaian sengketa tradisional. Dengan diberlakukannya Konvensi Mediasi Singapura, mediasi seharusnya menjadi metode utama penyelesaian sengketa di sepanjang BRI, baik bersamaan maupun sebelum arbitrase internasional. Perubahan menuju mediasi diharapkan dapat

meningkatkan tingkat penyelesaian, kepuasan disputan, partisipasi yang lebih besar, dan akhirnya, hasil lingkungan yang lebih baik dalam sengketa BRI.

Artikel lainnya yang membahas aplikasi konsep EC dalam kerangka BRI ditulis oleh Robert Weatherley dan Vanessa Bauer dengan judul “*A new Chinese Modernity? The discourse of Eco-civilisation applied to the Belt and Road Initiative*”. Artikel ini berdiskusi tentang sejauh mana wacana resmi Tiongkok tentang EC diterapkan dalam praktiknya. Konsep EC disajikan sebagai visi kemajuan manusia yang bertujuan untuk memisahkan perkembangan ekonomi dari degradasi lingkungan, dengan lima pilar yang tumpang tindih (lingkungan, ekonomi, masyarakat, budaya, dan tata pemerintahan) membentuk kerangka teoritisnya untuk mempromosikan harmoni antara manusia dan alam. Meskipun para pendukung melihatnya sebagai model modernitas Tiongkok yang berbasis pada nilai-nilai sosialis, artikel ini mempertanyakan klaim tersebut dalam konteks BRI. Penelitian tersebut menemukan bukti komitmen terhadap prinsip EC, tetapi mengidentifikasi kekurangan praktis yang signifikan dalam hal inklusi, penegakan hukum, dan transparansi dalam kerangka BRI.

Di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa penelitian mengenai program BRI. Namun, belum ada satupun artikel yang mengkaji bagaimana konsep EC diterapkan dalam proyek-proyek BRI yang ada di Indonesia. Salah satu penelitian tentang BRI di Indonesia berjudul “Kebijakan Belt and Road Initiative Sebagai Alat Soft Power Cina Dalam Membangun Hegemoni di Kawasan Asia Tenggara

(Studi Kasus: Investasi Cina di Indonesia)” dan ditulis oleh Gerald Theodorus Lumban Toruan. Penelitian ini meneliti program BRI di Asia Tenggara, terutama bantuan investasinya kepada negara-negara seperti Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Penelitian ini berpendapat bahwa investasi Tiongkok bertujuan untuk menegakkan hegemoni di wilayah ASEAN, dan menekankan pentingnya Indonesia memprioritaskan kepentingan nasional dan kedaulatannya dalam kerjasamanya dengan Tiongkok, seperti yang terlihat dalam kasus Sri Lanka.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	<i>Transplanting China's ecological civilization to the Belt and Road Initiative: What will it take?</i> (Brauteseth & Banik, 2023)	Penelitian ini menginvestigasi bagaimana aktor negara Tiongkok menafsirkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sejalan dengan Agenda 2030 dan TPB, terutama dalam konteks EC serta implikasinya terhadap hubungan internasional, khususnya di Afrika. Penelitian ini juga meneliti tantangan dan peluang yang terkait dengan prinsip-prinsip EC dalam ekspor, dan bagaimana para pemangku kepentingan	Penerapan EC dalam proyek-proyek BRI di Afrika menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, ada keraguan mengenai kesediaan Tiongkok untuk menerapkan standar-standar ini di luar negeri, terutama di tengah kekhawatiran mengenai “ <i>debt trap diplomacy</i> ” dan pengawasan media internasional.

		di Afrika dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut untuk menuntut akuntabilitas aktor-aktor Tiongkok dalam mematuhi norma dan praktik pembangunan berkelanjutan.	
2.	<i>Global ecological civilization: An analysis of macro-level policies of the Belt and Road Initiative</i> (Gheng & Lo, 2023)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Tiongkok terhadap keberlanjutan global melalui wacana lingkungan hidup dalam konsep EC. Studi ini menyelidiki bagaimana EC diintegrasikan ke dalam program BRI di bawah kepemimpinan Xi Jinping, menyoroti perbedaan antara interpretasi Tiongkok terhadap lingkungan dalam konteks domestik dan internasional.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BRI memiliki interpretasi EC yang berbeda dengan versi domestiknya, dengan fokus pada developmentalisme, perdagangan bebas, dan lingkungan hidup sukarela, namun ambigu terkait konsep seperti eko-sosialisme dan harmoni manusia-alam. Sementara itu, baik wacana domestik maupun internasional menekankan penggunaan teknologi sebagai solusi untuk tantangan lingkungan, menunjukkan tujuan BRI dalam mempromosikan teknologi ekologi Tiongkok secara global.
3.	<i>Ecological Civilization and Dispute Resolution in BRI</i> (Corne & Zhu, 2020)	Penelitian ini membahas bagaimana konsep EC digunakan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam program BRI	Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI menghadapi tantangan besar dalam berinteraksi dengan budaya, ekosistem, dan hukum lokal yang beragam, dan mengusulkan penggunaan mediasi sebagai alat utama penyelesaian sengketa, dengan tetap menjaga pentingnya arbitrase dalam memperhatikan prinsip-prinsip ekologis.

4.	<i>A new Chinese Modernity? The discourse of Eco-civilisation applied to the Belt and Road Initiative</i> (Weatherley & Bauer, 2021)	Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana wacana resmi Tiongkok tentang konsep EC diterapkan dalam praktiknya, khususnya dalam program BRI.	Meskipun ada bukti komitmen terhadap prinsip-prinsip EC, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kekurangan praktis yang signifikan terkait dengan inklusi, penegakan hukum, dan transparansi, terutama dalam konteks kerangka BRI.
5.	Kebijakan Belt and Road Initiative Sebagai Alat <i>Soft Power</i> Cina Dalam Membangun Hegemoni di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Investasi Cina di Indonesia) (Toruan, 2021)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji program BRI di Asia Tenggara, khususnya bantuan investasinya kepada negara-negara seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana BRI berdampak pada kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk membangun <i>soft power</i> -nya di dunia, terutama di Asia Tenggara. Secara khusus dalam konteks BRI di Indonesia, upaya tersebut sejalan dengan program Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo, dengan memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan matriks tabel diatas dapat dilihat letak persamaan dan perbedaan Peneliti dengan penelitian terdahulu. Sebelumnya, telah terdapat penelitian yang membahas bagaimana usaha Tiongkok dalam menerapkan prinsip EC dalam program BRI seperti dalam penelitian pertama hingga keempat dalam tabel. Namun, keempat penelitian tersebut hanya berfokus pada konteks dinamika program BRI di ranah global atau negara tertentu saja. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis fokus membahas proyek BRI yang ada di Indonesia, secara spesifik membahas proyek KCIC dan IMIP. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi perbedaan implementasi prinsip EC jika proyek BRI dilakukan

dalam bentuk *joint-venture* dan utang, sesuatu yang belum ada di penelitian-penelitian terdahulu.

Selanjutnya, penelitian mengenai implementasi prinsip EC di proyek BRI yang ada di Indonesia juga belum pernah dilakukan, baik oleh peneliti lokal maupun internasional. Penelitian terdahulu hanya banyak membahas mengenai kepentingan negara yang terlibat seperti yang terlihat di penelitian kelima dalam tabel. Melihat celah penelitian tersebut, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian yang tersedia dengan mengkaji bagaimana konsep EC diimplementasikan dalam proyek BRI di Indonesia.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN